



RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK**



(0291) 681773



bakesbangpol.demakkab.go.id

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pemerintahan umum bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Ranwal RENSTRA ini masih banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran dari semua pihak dan stakeholder untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Perubahan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, 4 September 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Demak


Kendaria Iriani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum..... I-2

1.3 Maksud Dan Tujuan..... I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH II-1

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... II-1

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II-22

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN . III-1

3. 1 Tujuan dan Sasaran III-1

3. 2 Strategi dan Kebijakan III-4

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... IV-1

4. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD..... IV-1

4. 2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IV-25

BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025..... II-7

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 II-8

Tabel 2.3 Aset Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II-9

Tabel 2.4 Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II-9

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 II-12

Tabel 2.6 Hasil Evaluasi SAKIP Bakesbangpol Tahun 2022 s/d 2024 II-16

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak. II-20

Tabel 2.8 Rumusan Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II-33

Tabel 2.9 Indikasi Program RTRW Kab. Demak Tahun 2021-2025 II-42

Tabel 2.10 Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak II-44

Tabel 2.11 Rekomendasi Pencapaian TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak..... II-44

Tabel 2.12 Isu Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 II49

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik III-2

Tabel 3.2 Tahapan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ... III-5

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029..... III-7

Tabel 4.1 Dukungan Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 IV-3

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak. IV-5

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak..... IV-26

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak..... IV-27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang

berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah
23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 51 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak, tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

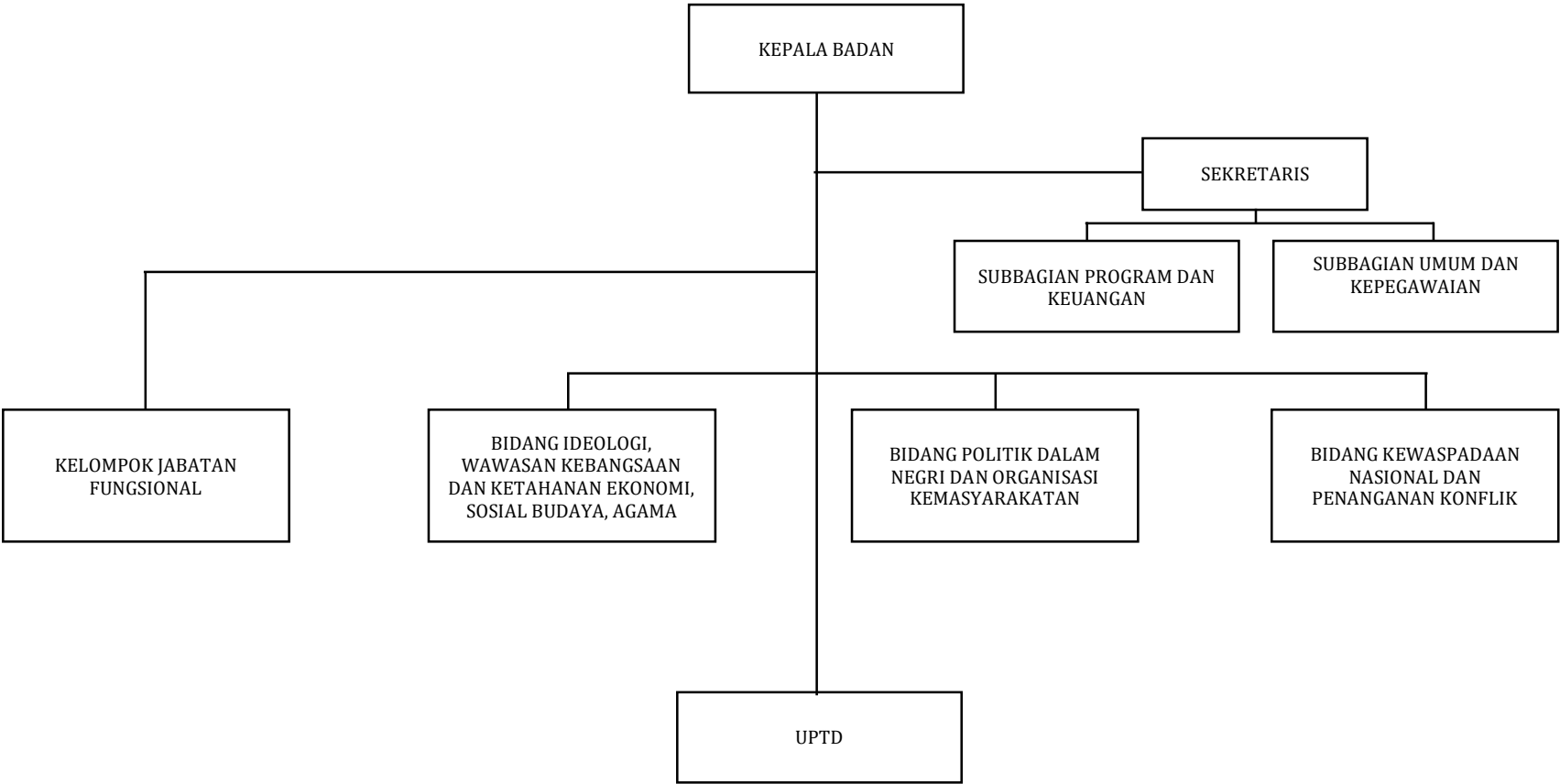
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- b. penyusunan program kerja, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyusunan program kerja, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. koordinasi dan penyusunan program, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset, pengelolaan ASN di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesantaun Bangsa dan Politik Kabupaten Demak



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian tugas jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Sekretaris Badan

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas koordinasi dan penyusunan program, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset, pengelolaan ASN di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. pengelolaan urusan ASN di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan membawahi dua kepala sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- b. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- c. pengelolaan urusan ASN di lingkungan Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. penyusunan program kerja, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- c. pembentukan pasukan pengibar bendera; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Subtansi yaitu:

1. Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik di Daerah;
- b. penyusunan program kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Subtansi yaitu:

1. Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri; dan
2. Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan.

Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan di Daerah;
- b. penyusunan program kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik di Daerah;
- c. fasilitasi kegiatan forum koordinasi pimpinan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Subtansi yaitu:

1. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
2. Kelompok Substansi Penanganan Konflik.

2.1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diklasifikasikan ke dalam Tabel 2.1. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	0	2	1	2	1	7
4	D3	0	0	0	0	0	0	0
5	S1	3	2	4	5	1	1	16
6	S2	3	3	0	0	0	0	6
7	S3	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	7	5	6	6	3	2	29

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol;2025

Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 16 orang atau 55,17% sedangkan perempuan sebanyak 13 orang atau 44,83%. Jumlah PNS sebanyak 12 orang atau 41,38% sama dengan jumlah PPPK yang sebanyak 12 orang atau 41,38% sedangkan Non ASN sebanyak 5 orang atau 17,24%, kebijakan Pemerintah pusat yang lebih banyak mengangkat/mengisi lowongan lewat jalur PPPK dibanding melalui CPNS, hal ini dimaksudkan dalam rangka mengurangi tenaga honorer di Kabupaten Demak. Sesuai tugas fungsi Bakesbangpol yang lebih banyak koordinasi diluar dan monitoring serta penggalangan sebetulnya lebih banyak membutuhkan personil laki-laki, namun hasil penjangkaran perempuan lebih memiliki kualitas akademik lebih baiksesuai tugas fungsi Bakesbangpol yang lebih banyak koordinasi diluar dan monitoring serta penggalangan sebetulnya lebih banyak membutuhkan personil laki-laki, namun hasil penjangkaran perempuan lebih memiliki kualitas akademik lebih baik

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas 29 karyawan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	3	2	5
2	PPPK	6	6	12
3	PNS Golongan II	0	0	0
4	PNS Golongan III	5	3	8
5	PNS Golongan IV	2	2	4
	Jumlah	16	13	29

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol;2025

Dari jumlah karyawan Bakesbangpol sejumlah 4 orang atau 13,79% masuk Golongan IV, Golongan III sebanyak 8 orang atau 27,59%, Golongan II nihil, dikarenakan sudah tidak penerimaan CPNS dari jalur SMA atau sederajat. Karyawan PPPK sebanyak 12 orang 41,38% dan Non ASN sebanyak 5 orang atau 17,24%.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berasal dari APBD maupun Kabupaten Demak dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengada an	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pengguna an	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol;2025

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangun an (B, KB, RB)	Luas Lant ai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangun an (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol;2025

Bakesbangpol dalam catatan Inventaris tidak mencatat Aset tidak bergerak baik berupa tanah maupun bangunan. Bangunan yang ditempati Bakesbangpol tercatat di Inventaris Inspektorat Daerah sedangkan tanah tercatat menjadi satu di Sekretariat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai berada di Jalan Kyai Mugni Momor 1018-A Bintoro Demak menempati gedung bersama Sekretariat PKK dan Dharma Wanita Persatuan, Bakesbangpol berada di Lantai 2 dan 3.



Lantai 2 dipergunakan untuk ruang kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Kepala Badan,
- Sekretariat
- Bidang Iwasbang dan Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
- Bidang Poldagri dan Ormas
- Bidang Wasnas dan PK

Lantai 3 Bakesbangpol dipergunakan untuk:

- Ruang Pertemuan Pancasila
- Ruang Rapat Garuda
- Ruang Arsip
- Ruang Laktasi
- Musholla

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Pemerintahan umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak, bahwa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah, maka **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tidak mempunyai standar pelayanan minimal (SPM)** yaitu ketentuan mengenai Jenis dan Mutu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Oleh karena itu **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hanya menggunakan Indikator Tujuan dan Sasaran PD** dalam melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun keseluruhan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik disajikan dalam tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	x	IKU	88,2	89,5	90,8	92	93,5	88,59	89,5	91,77	NA	NA	100,44	100,00	101,07	NA	NA
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	x	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA
3	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Angka	x	IKU	78,62	79,18	80,07	81,74	82,41	77,91	78,21	78,66	NA	NA	99,10	98,77	98,24	NA	NA
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target	Persen	x	IKU	100	100	100	100	100	87,5	87,5	87,5	NA	NA	75	75	75	NA	NA
5	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	x	IKU	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	NA	NA	100	100	100	NA	NA
6	Kasus konflik antar /intra umat beragama	Kejadian	x	IKU	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	0 = Tidak ada	NA	NA	100	100	100	NA	NA
7	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	Persen	x	IKU	74,5	76,08	78,1	79,68	81,68	75,3	77,06	78,2	NA	NA	101,07	101,29	100,13	NA	NA
8	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	Persen	x	IKU	79,3	81,2	82,8	84,2	86	80	82	83	NA	NA	100,88	100,99	100,24	NA	NA

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan rata-rata kinerja Bakesbangpol periode 2021-2026 dapat terlaksana dengan baik meskipun terdapat kendala-kendala yang ada, antara lain karena kurangnya kuantitas dan kualitas personil, dan adanya kebijakan tentang penyederhanaan birokrasi yang belum bisa sepenuhnya bisa dilaksanakan sehingga membuat kegamangan personil Bakesbangpol. Jumlah personil Bakesbangpol pada tahun 2021-2022 hanya sebanyak 11 orang, terdapat 5 jabatan struktural yang kosong, namun komitmen pimpinan mampu melaksanakan kinerja dengan baik dengan mengoptimlkan personil yang ada.

Dari Tabel 2.5 diatas dapat digambarkan capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Tujuan 1 “Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah” dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Mengacu pada tabel 2.5, Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan penilaian yang positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bakesbangol Kabupaten Demak. Jika dibandingkan dengan nilai IKM Bakesbangol Kabupaten Demak tahun 2023 dengan nilai 89,5 maka terdapat kenaikan 2,27 poin. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat kenaikan 0,91 poin. Tren nilai IKM dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terus mengalami kenaikan. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Bakesbangol Kabupaten Demak tersaji dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan gambar tren nilai IKM Bakesbangol Kabupaten Demak di atas menunjukkan bahwa upaya berkelanjutan untuk meningkatkan

kualitas layanan telah berdampak kepada nilai IKM. Untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini, penting untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ini ASN Kabupaten Demak.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan nilai SKM Bakesbangol Kabupaten Demak:

1. Peningkatan SDM

Bakesbangol Kabupaten Demak terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepada ASN. Peningkatan kompetensi ini didukung dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai di Bakesbangol Kabupaten Demak, pelaksanaan coaching clinic, bimbingan teknis, dan juga program magang.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam memberikan layanan di Bakesbangpol baik berupa layanan SKTL, keterangan keberadaan ormas dan lainnya telah memanfaatkan teknologi informasi khususnya keterangan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dengan memanfaatkan Aplikasi Silayarmas, untuk SKTL menggunakan Google form.

2. Analisis Kinerja Sasaran 1 :”Terwujudnya pelayanan publik yang responsif” dengan indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan tabel 2.5, persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terealisasi 100% sesuai dengan target. Untuk menampung aduan/keluhan masyarakat, Bakesbangpol Kabupaten Demak telah menyediakan Sp4n Lapor Instagram dan tempat aduan lainnya. Setiap tahunnya aduan/keluhan yang masuk tidak ada, meskipun secara resmi saran dan keluhan tidak ada yang masuk namun ketika ada saran dan masukan ke Bakesbangpol yang tidak resmi segera ditindaklanjuti dengan baik dan responsif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif dipengaruhi oleh faktor yang saling mendukung antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berintegritas

Kompetensi mencakup kemampuan teknis, pemahaman regulasi, serta ketrampilan interpersonal yang memungkinkan berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif. Sedangkan SDM yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial

Teknologi telah menjadi alat yang tidak terpisahkan dalam mendukung pelayanan publik yang responsif. Digitalisasi membuat pelayanan menjadi lebih cepat, terukur dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Bakesbangpol telah menyediakan layanan Silayarmas yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

3. Budaya pelayanan dan inovasi yang berkelanjutan

Keberhasilan pelayanan publik yang responsif di Bakesbangpol Kabupaten Demak tidak terlepas dari internalisasi core values ASN yang setiap minggu dibacakan pada saat apel pagi. Core values ASN yang terinternalisasi pada setiap pegawai akan mendorong perubahan budaya pelayanan dan akan meningkatkan kualitas pelayanan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan tercapainya sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif antara lain:

1. Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif
2. Kurangnya jumlah pegawai yang kompeten dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pelayanan publik
3. Anggaran yang terbatas menghambat pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi
4. Aturan birokrasi yang terlalu panjang dan rumit sehingga menyebabkan kebingungan penerima layanan dan menghambat respon cepat dalam memberikan layanan

Strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan antara lain:

1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai di bidang kepegawaian
2. Mengusulkan peningkatan anggaran untuk pengembangan layanan
3. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi terkait kepegawaian agar lebih sederhana dan jelas

3. Analisis Kinerja Tujuan 2:”Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikator Nilai SAKIP Bakesbangpol

Berdasarkan tabel 2.5, realisasi nilai SAKIP Bakesbangpol dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami tren meningkat, walaupun kenaikan per tahunnya tidak lebih dari 1 point. Apabila realisasinya dibandingkan dengan target Renstra, rasio capaian tahun 2022 hingga 2024 belum bisa mencapai 100%. Nilai SAKIP merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi. Berikut tabel hasil evaluasi SAKIP per komponen dari tahun 2022 hingga 2024:

Tabel 2.6
Hasil Evaluasi SAKIP Bakesbangpol Tahun 2022 s/d 2024

No	Komponen	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	23,10	27,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	21,90	22,20	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	13,95	10,50	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	23,75	18,50	19,25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,91	78,21	78,66

Sumber: LHE SAKIP Bakesbangpol

Dari tabel hasil evaluasi SAKIP Bakesbangpol di atas, komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja telah meningkat per tahunnya, namun untuk pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengalami penurunan. Atas hasil evaluasi tersebut Bakesbangpol Kabupaten Demak terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari APIP agar dapat meningkatkan nilai di tahun selanjutnya dan sistem akuntabilitas dapat terus meningkat.

4. Analisis Kinerja Sasaran 2:”Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah” dengan indikator persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target

Berdasarkan tabel 2.5, realisasi persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah 87,5% di tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun dari 2022-2024 ada indikator yang realisasinya tidak tercapai yaitu Nilai SAKIP Bakesbangpol, meskipun mengalami

kenaikan nilai namun masih belum memenuhi target yang telah ditentukan, adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Demak:

1. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara rutin
2. Meningkatkan mitigasi resiko dan merumuskan solusi/inovasi dalam menghadapi permasalahan/hambatan
3. Meningkatkan kolaborasi antar instansi baik internal maupun eksternal dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang baik

5. Analisis Kinerja Tujuan 3: "Meningkatkan Kondusifitas Wilayah" dengan indikator Angka Kejadian Konflik Sosial

Berdasarkan tabel 2.5, realisasi persentase indikator kinerja Tujuan capaian kinerja indikator ini mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 100%, hal ini terwujud dengan tidak adanya kejadian konflik sosial di Kabupaten Demak. Konflik Sosial adalah Benturan Fisik Dengan Kekerasan Antara Dua Kelompok Masyarakat Atau Lebih Yang Berlangsung Dalam Waktu Tertentu Yang Didasarkan Pada Sentimen Identitas Yang Menyangkut Keturunan, Agama, Kesukuan Dan Golongan.

Kondusifitas wilayah diperlukan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lebih kondusif iklim investasi. Wilayah Kabupaten Demak yang kurang produktif telah direncanakan untuk wilayah perusahaan guna menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Analisis Kinerja Sasaran 3 : "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama dengan indikator Kasus konflik antar /intra umat beragama

Berdasarkan tabel 2.5, realisasi persentase indikator kinerja Sasaran strategis capaian kinerja indikator ini mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 100%, hal ini terwujud dengan tidak adanya kejadian konflik antar/intra Umat Beragama di Kabupaten Demak.

Konflik antar/intra umat beragama sebagai bagian dari Konflik sosial menjadi bagian paling penting menjaga kondusifitas. Permasalahan agama sangat sensitif dan sering menjadi konflik yang berkepanjangan. Bakesbangpol sebagai perangkat yang mengawal terwujudnya kondusifitas Kabupaten Demak selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong tercapainya indikator tujuan dan sasaran ini adalah:

1. Pemahaman masyarakat dalam beragama yang baik sehingga tumbuh saling menghormati dalam kehidupan beragama.
2. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusifitas kehidupan beragama.
3. Meningkatnya peran forum keagamaan dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Selain faktor pendorong pencapaian kinerja pada sasaran ini juga terdapat hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain yaitu

1. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat globalisasi yang tidak difilter dengan baik
2. Semakin maraknya konten-konten intoleransi di media online yang mudah diakses
3. Kecenderungan masyarakat yang merasa paling benar dalam beragama.

7. Analisis Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator 1. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik. 2. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa

Berdasarkan tabel 2.5, realisasi persentase indikator kinerja Sasaran strategis capaian kinerja indikator ini mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat tercapai 100% bahkan lebih. Terealisasinya indikator ini sangat mendukung terwujudnya indikator tujuan untuk meningkatkan kondusivitas wilayah dengan indikator tidak ada kejadian konflik sosial.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik dan kesatuan bangsa" mengacu pada upaya atau hasil di mana masyarakat secara umum memiliki pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman yang lebih baik tentang:

Politik: Termasuk sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, partisipasi politik, serta pengaruh kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan kritis dalam berpartisipasi

dalam proses demokrasi, seperti pemilu, diskusi kebijakan publik, atau pengawasan terhadap pemerintah.

Kesatuan Bangsa: Pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat, serta kesadaran untuk meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa, dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Meningkatnya pemahaman ini juga dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial serta memperkuat identitas nasional

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hasil interpretasi ini ditunjukkan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.086.652.665	2.539.767.318	2.409.752.835	2.623.759.094	2.560.642.684	2.257.937.097	2.727.539.900	3.088.342.200	4.088.738.100	-	108,21	107,39	128,16	159,71	-	5,77	23,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	30.000.000	35.000.000	50.000.000	35.000.000	-	20.750.000	-	8.721.500	-	#DIV/0!	69,17	-	17,44	-	7,38	98,23
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	17.000.000	19.000.000	25.000.000	19.000.000	-	13.250.000,00	-	5.000.000,00	-	#DIV/0!	77,94	-	20,00	-	4,84	60,87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	1.500.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	-	750.000,00	-	1.976.000,00	-	#DIV/0!	50,00	-	39,52	-	30,83	9120,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	1.500.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	-	750.000,00	-	1.745.500,00	-	#DIV/0!	50,00	-	34,91	-	30,83	83,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	10.000.000	12.000.000	15.000.000	12.000.000	-	6.000.000,00	-	-	-	#DIV/0!	60,00	-	-	-	6,25	20,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.902.286.665	1.970.417.318	1.997.908.835	2.081.859.094	2.160.742.684	1.850.864.097	1.955.991.000	2.675.490.400	3.624.284.100	-	97,30	99,27	133,91	174,09	-	3,24	25,98
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.731.786.665	1.782.867.318	1.800.981.335	1.855.084.094	1.911.114.184	1.680.364.097	1.803.191.000	2.519.668.400	3.461.062.000	-	97,03	101,14	139,91	186,57	-	2,50	28,14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.500.000	187.550.000	196.927.500	226.775.000	249.628.500	170.500.000	152.800.000	155.822.000	163.222.100	-	100,00	81,47	79,13	71,98	-	10,06	-1,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.760.000	70.000.000	30.000.000	100.000.000	60.000.000	25.760.000	65.500.000	-	86.323.000	-	100,00	93,57	-	118,75	-	76,98	51,42
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	20.000.000	-	35.000.000	20.000.000	0	15.500.000	-	18.750.000	-	#DIV/0!	77,50	#DIV/0!	53,57	-	-10,71	33,33
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.760.000	50.000.000	30.000.000	65.000.000	40.000.000	25.760.000	50.000.000	-	67.573.000	-	100,00	100,00	-	153,85	-	33,08	97,10

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.192.300	224.850.000	141.700.000	145.400.000	138.900.000	130.575.200	257.521.000	177.031.800	146.519.500	-	180,87	114,53	124,93	141,97	-	43,16	27,52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	4.495.300	7.000.000	7.000.000	9.000.000	8.000.000	6.535.300	5.000.000	7.000.000	5.000.000	-	145,38	71,43	100,00	55,56	-	18,29	-4,02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.002.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	14.000.000	25.984.900	23.000.000	28.000.000	30.000.000	-	123,73	158,62	193,10	200,00	-	-8,54	5,80
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	8.000.000	22.500.000	20.643.000	-	#DIV/0!	123,08	346,15	317,58	-	0,00	57,67
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	14.495.000	15.000.000	15.000.000	17.000.000	15.000.000	16.495.000	13.000.000	15.000.000	17.076.500	-	113,80	86,67	100,00	100,45	-	1,26	2,68
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	100,00	100,00	100,00	60,00	-	16,67	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	-	#DIV/0!	100,00	57,14	71,43	-	6,43	23,89
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	31.000.000	94.000.000	88.000.000	85.000.000	83.000.000	78.860.000	112.321.000	100.031.800	65.100.000	-	254,39	119,49	113,67	147,06	-	47,77	18,82
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	4.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	2.500.000	1.300.000	5.000.000	-	#DIV/0!	60,24	32,50	125,00	-	-0,90	78,87
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	80.000.000	2.000.000	3.400.000	3.400.000	-	90.000.000	-	-	-	#DIV/0!	112,50	-	-	-	-6,88	33,33
	-																
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	140.000.000	80.000.000	135.000.000	50.000.000	140.300.000	289.224.000	66.900.000	29.990.000	-	#DIV/0!	206,59	83,63	29,11	-	-9,27	-3,99
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	70.000.000	30.000.000	53.670.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-14,29	33,33
Pengadaan Mebel	-	30.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	8.790.000	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	90,50	#DIV/0!	-25,00	33,33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	110.000.000	40.000.000	20.000.000	-	-	266.924.000	66.900.000	21.200.000	-	#DIV/0!	242,66	167,25	106,00	#DIV/0!	-53,41	-47,75
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	40.000.000	25.000.000	20.000.000	86.630.000	22.300.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-14,38	-24,75

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	13.000.000	15.000.000	15.000.000	14.000.000	13.500.000	13.000.000	11.500.000	11.500.000	12.000.000	-	100,00	76,67	76,67	85,71	-	1,29	-2,40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000		100,00	50,00	50,00	100,00	-	35,42	27,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		100,00	83,33	83,33	83,33	-	0,00	-5,56
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	73.413.700	89.500.000	110.144.000	97.500.000	102.500.000	97.437.800	127.053.900	157.420.000	180.900.000	-	132,72	141,96	142,92	185,54	-	9,66	23,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	31.000.000	40.000.000	46.450.000		#DIV/0!	124,00	160,00	185,80	-	0,00	15,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.100.300	50.000.000	55.000.000	50.000.000	55.000.000	91.100.300	66.153.900	65.000.000	75.000.000		142,12	132,31	118,18	150,00	-	-2,77	-4,58
Pemeliharaan Mebel	-	-	1.500.000	500.000	500.000				0		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	8,33	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	5.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	-	5.000.000	9.000.000	11.500.000		#DIV/0!	100,00	100,00	143,75	-	17,22	35,93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.003.400	6.500.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000	1.027.500	18.400.000	9.000.000	7.000.000		25,67	283,08	100,00	100,00	-	19,65	539,15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.310.000	3.000.000	10.644.000	7.000.000	7.000.000	5.310.000	6.500.000	34.420.000	40.950.000		100,00	216,67	323,37	585,00	-	44,27	156,97
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.165.503.000	410.000.000	545.000.000	685.000.000	610.000.000	1.336.903.000	2.024.218.000	2.045.690.000	1.700.305.000		114,71	493,71	375,36	261,31	-	-4,29	13,32
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>1.165.503.000</i>	<i>410.000.000</i>	<i>545.000.000</i>	<i>685.000.000</i>	<i>610.000.000</i>	<i>1.336.903.000</i>	<i>2.024.218.000</i>	<i>2.045.690.000</i>	<i>1.700.305.000</i>		114,71	493,71	375,36	261,31	-	-4,29	13,32

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	30.000.000	55.000.000	85.000.000	65.000.000	-	5.000.000	-	-		#DIV/0!	16,67	-	-	-	28,59	33,33
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.061.500.000	125.000.000	200.000.000	300.000.000	250.000.000	1.232.900.000	1.677.818.000	1.390.300.000	1.038.160.000		116,15	1.342,25	695,15	350,00	-	1,28	-1,84
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	104.003.000	225.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	104.003.000	281.400.000	191.427.000	66.275.000		100,00	125,07	76,57	32,00	-	31,86	26,80
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	30.000.000	40.000.000	50.000.000	45.000.000	-	60.000.000	-	50.000.000		#DIV/0!	200,00	-	100,00	-	12,08	33,33
Pembentukan Paskibraka	-	-	-	-	-	-	-	463.963.000	525.500.000		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	25,00	6,18
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	25,00	33,33
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	10.370.000		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	25,00	33,33
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.225.310.000	2.027.235.100	65.325.181.400	2.189.742.500	2.306.342.500	1.523.810.000	26.181.993.700	40.626.098.100	3.971.472.000		124,36	1.291,51	62,19	181,37	-	774,13	527,71

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.225.310.000	2.027.235.100	65.325.181.400	2.189.742.500	2.306.342.500	1.523.810.000	26.181.993.700	40.626.098.100	3.971.472.000		124,36	1.291,51	62,19	181,37	-	774,13	527,71
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	55.000.000	45.000.000	83.400.000	40.000.000	-	5.000.000	-	-		#DIV/0!	9,09	-	-	-	3,78	33,33
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	59.321.000	240.000.000	580.000.000	250.000.000	350.000.000	357.821.000	1.375.300.000	785.658.000	1.235.000.000		603,19	573,04	135,46	494,00	-	107,34	99,56
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	180.000.000	210.000.000	180.000.000	240.000.000	-	231.031.000	136.605.200	50.000.000		#DIV/0!	128,35	65,05	27,78	-	8,93	-34,76

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.165.989.000	1.552.235.100	64.490.181.400	1.676.342.500	1.676.342.500	1.165.989.000	24.570.662.700	39.703.834.900	2.686.472.000		100,00	1.582,92	61,57	160,26	-	997,60	658,55
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.922.397.600	695.000.000	2.403.200.000	1.095.000.000	2.270.000.000	4.422.397.600	855.400.000	2.757.880.000	2.990.000.000		89,84	123,08	114,76	273,06	-	53,19	50,06
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.922.397.600	695.000.000	2.403.200.000	1.095.000.000	2.270.000.000	4.422.397.600	855.400.000	2.757.880.000	2.990.000.000		89,84	123,08	114,76	273,06	-	53,19	50,06
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	40.000.000	50.000.000	150.000.000	50.000.000	-	10.000.000	-	-		#DIV/0!	25,00	-	#VALUE!	-	39,58	33,33
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	22.397.600	180.000.000	200.000.000	270.000.000	250.000.000	22.397.600	260.000.000	330.700.000	540.000.000		100,00	144,44	165,35	200,00	-	185,59	383,77
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	75.000.000	33.200.000	75.000.000	70.000.000	-	30.000.000	13.000.000	25.000.000		#DIV/0!	40,00	39,16	33,33	-	15,88	11,88

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.900.000.000	400.000.000	2.120.000.000	600.000.000	1.900.000.000	4.400.000.000	555.400.000	2.414.180.000	2.425.000.000		89,80	138,85	113,88	404,17	-	120,78	82,58
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	429.635.000	1.085.000.000	1.305.000.000	1.640.000.000	1.160.000.000	424.835.000	649.627.000	732.500.000	265.000.000		98,88	59,87	56,13	16,16	-	42,30	0,62
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	429.635.000	1.085.000.000	1.305.000.000	1.640.000.000	1.160.000.000	424.835.000	649.627.000	732.500.000	265.000.000		98,88	59,87	56,13	16,16	-	42,30	0,62
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	22.500.000	50.000.000	50.000.000	95.000.000	40.000.000	22.500.000	71.127.000	13.600.000	-		100,00	142,25	27,20	#VALUE!	-	38,58	45,08
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57.135.000	165.000.000	175.000.000	300.000.000	250.000.000	52.335.000	213.500.000	311.000.000	49.000.000		91,60	129,39	177,71	16,33	-	62,40	89,79
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	50.000.000	30.000.000	95.000.000	20.000.000	-	65.000.000	7.900.000	16.000.000		#DIV/0!	130,00	26,33	16,84	-	24,43	4,90
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.000.000	820.000.000	1.050.000.000	1.150.000.000	850.000.000	350.000.000	300.000.000	400.000.000	200.000.000		100,00	36,59	38,10	17,39	-	36,44	-10,32

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.189.775.400	1.150.000.000	1.200.000.000	1.598.000.000	1.168.500.000	1.061.592.400	1.413.382.100	1.351.400.000	1.432.586.500		89,23	122,90	112,62	89,65	-	1,82	11,59
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.189.775.400	1.150.000.000	1.200.000.000	1.598.000.000	1.168.500.000	1.061.592.400	1.413.382.100	1.351.400.000	1.432.586.500		89,23	122,90	112,62	89,65	-	1,82	11,59
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	30.000.000	75.000.000	95.000.000	38.500.000	-	5.000.000	-	-		#DIV/0!	16,67	-	-	-	29,30	33,33
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	62.964.000	75.000.000	90.000.000	180.000.000	105.000.000	50.368.000	375.719.700	60.000.000	40.450.000		79,99	500,96	66,67	22,47	-	24,36	176,45
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	289.795.400	350.000.000	350.000.000	350.000.000	300.000.000	306.819.400	281.262.400	285.000.000	288.633.000		105,87	80,36	81,43	82,47	-	1,62	-1,91

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (RENSTRA)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75.000.000	95.000.000	85.000.000	120.000.000	75.000.000	75.000.000	195.000.000	114.470.000	170.000.000		100,00	205,26	134,67	141,67	-	4,95	55,74
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	762.016.000	600.000.000	600.000.000	853.000.000	650.000.000	629.405.000	556.400.000	891.930.000	933.503.500		82,60	92,73	148,66	109,44	-	-0,72	17,79

c. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bakesbangpol Kabupaten Demak merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol memiliki kelompok sasaran pelayanan antara lain

Kelompok sasaran pelayanan Bakesbangpol mencakup seluruh elemen masyarakat yang berperan dalam memperkuat kesatuan bangsa dan kehidupan politik yang sehat. Sasaran utamanya meliputi tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta aparatur pemerintahan daerah. Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, demokrasi, toleransi, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembinaan, fasilitasi, dan edukasi, Bakesbangpol mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis, sadar hukum, dan berdaya saing, serta mendorong terciptanya kondusivitas wilayah yang aman dan damai

Bakesbangpol juga memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat terkait pendaftaran ormas dan juga surat keterangan tanda lapor bagi warga negara dan tenaga kerja asing yang berada di Kabupaten Demak.

d. Mitra Bakesbangpol dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, BAKESBANGPOL Kabupaten Demak membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini menjadi bagian integral dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan program, serta akselerasi pencapaian tujuan pembangunan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Mitra kerja BAKESBANGPOL dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu mitra internal, mitra antar perangkat daerah, mitra vertikal, serta mitra eksternal lainnya. Mitra internal mencakup seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang tergabung dalam penyusunan rencana aksi Penanganan Konflik Sosial, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba.

Sementara itu, mitra antar perangkat daerah mencakup unit kerja teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

(Bapperida), Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Setda Bagian Organisasi, dan Setda Bagian Hukum. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk perencanaan strategis, penguatan akuntabilitas, pemenuhan anggaran berbasis kinerja.

BAKESBANGPOL juga bermitra erat dengan instansi vertikal, seperti Kantor Kejaksaan Negeri, Polres Demak, Kodim 0716 Demak, Badan Intelijen Negara wilayah Jawa Tengah dan Instansi lainnya yang mempunyai fungsi intelijen. Mitra ini berperan penting dalam peningkatan kewaspadaan deteksi dini dan pencegahan dini, agar tidak terjadi konflik yang meluas.

Dengan memperkuat jejaring dan kolaborasi strategis dengan seluruh mitra tersebut, BAKESBANGPOL Kabupaten Demak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bidang Kesatuan bangsa dan politik secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Bakesbangpol tidak secara langsung menerima dukungan baik berupa apapun dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan, namun demikian ke depan bisa dilakukan penjangkauan termasuk menjajaki potensi peran BUMD dalam mendukung pengembangan SDM aparatur, seperti penguatan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang mendukung tujuan pembangunan aparatur Daerah.

f. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Bakesbangpol selaku perangkat daerah yang bertugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mampu/bertanggung jawab secara langsung kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dengan pihak lain.

g. Inovasi Perangkat Daerah

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan terutama masyarakat, Bakesbangpol telah mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu “SILAYARMAS” yaitu aplikasi yang memudahkan masyarakat pengguna layanan mendaftarkan/melaporkan keberadaan organisasi

kemasyarakatan yang dibentuk agar tercatat di Bakesbangpol, ketika semua persyaratan telah terpenuhi maka keterangan keberadaan ormas bisa jadi dalam waktu 2 hari sejak dinyatakan lengkap.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Meningkatnya Polarisasi Politik

Pemilu dan dinamika politik nasional sering memicu polarisasi di masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial. Polarisasi ini dapat mengikis rasa persatuan, memicu ujaran kebencian, dan menurunkan toleransi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang masih cukup rendah dan rendahnya partisipasi aktif laki-laki dalam pemilu perlu dirumuskan upaya dengan mencari penyebab untuk meningkatkan partisipasi.

2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Media Sosial

Arus informasi yang cepat dan tidak terfilter memudahkan penyebaran hoaks, provokasi, dan propaganda yang dapat memicu konflik sosial atau memecah belah masyarakat.

3. Munculnya Paham Radikalisme dan Intoleransi

Masih ada potensi masuknya ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan Pancasila, baik melalui jalur pendidikan non-formal, media online, maupun infiltrasi di kelompok-kelompok masyarakat.

Dalam pluralisme, Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada nilai persatuan dan kesatuan, menjadi tugas kita untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta menolak ideologi yang menyimpang dari nilai luhur bangsa.

4. Kerentanan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial

Krisis ekonomi global, inflasi, dan pengangguran dapat menjadi faktor pemicu meningkatnya konflik horizontal akibat perebutan sumber daya dan kecemburuan sosial.

5. Perubahan Demografi dan Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat di perkotaan berpotensi menimbulkan benturan budaya, pergeseran nilai, dan menurunnya rasa memiliki terhadap nilai kebangsaan.

6. Ancaman Disintegrasi dan Konflik SARA

Konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan masih terjadi di beberapa daerah, terutama jika dipicu oleh perbedaan pendapat politik atau isu lokal yang sensitif.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1) Penguatan Literasi Politik dan Wawasan Kebangsaan

Momentum pesta demokrasi, kegiatan kemasyarakatan, dan program pendidikan politik dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai persatuan dan demokrasi yang sehat.

2) Pemanfaatan Teknologi untuk Edukasi

Media sosial, aplikasi, dan platform digital dapat dijadikan sarana kampanye positif, sosialisasi Pancasila, dan penyebaran konten edukatif tentang kebangsaan.

3) Sinergi Antar Lembaga dan Stakeholder

Kerja sama antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, LSM, dan perguruan tinggi dapat memperluas jangkauan pembinaan masyarakat dalam menjaga persatuan.

4) Modal Sosial dan Budaya Lokal

Kearifan lokal, tradisi gotong royong, dan nilai-nilai adat dapat dijadikan kekuatan untuk meredam konflik dan meningkatkan kohesi sosial.

5) Dukungan Regulasi dan Kebijakan Nasional

Adanya arahan strategis dari pemerintah pusat, seperti Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) dan penguatan ideologi Pancasila, memberikan payung hukum untuk program di daerah.

- 6) Kesadaran Masyarakat terhadap Ancaman Disintegrasi
- Meningkatnya kesadaran masyarakat pasca berbagai konflik sosial dan bencana dapat menjadi titik masuk untuk mengajak mereka aktif menjaga kerukunan.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Demak Nomor 51 tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- 1. Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol
 - 2. Kurang optimalnya pelayanan publik Badan Kesbangpol
 - 3. Menurunnya kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan demokrasi
 - 4. Kurang Optimalnya Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini
- penjabaran permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Rumusan Permasalahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Kurangnya kualitas pelayanan publik Bakesbangpol	Kurangnya sarana prasarana penunjang yang memadai
		Belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
		Kurang optimalnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Belum terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional kantor
		Kurang optimalnya pemeliharaan kendaraan operasional kantor

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas
		Belum terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai
		Kurang optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi
		Kurang optimalnya sosialisasi peraturan perundangan bagi pegawai
		Belum terpenuhinya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai
		Kurangnya keterbukaan informasi publik
		Kurang ter updatenya Website dan papan pengumuman Bakesbangpol
		Kurangnya pejabat pengelola informasi publik Bakesbangpol
		Kurangnya kanal aduan dan tindak lanjut pengaduan di Bakesbangpol
		Kurang optimalnya pengelolaan arsip Bakesbangpol dengan baik
2.	Kecenderungan kurangnya akuntabilitas kinerja Bakesbangpol	Kurang optimalnya perencanaan kinerja yang baik
		Kurang Optimalnya dokumen renstra Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya dokumen renja Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya penganggaran perangkat daerah yang baik
		Kurang Optimalnya dokumen RKA Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya dokumen DPA Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya Register Risiko Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Kurang Optimalnya monev bulanan Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya monev tri bulanan Bakesbangpol
		Kurang Optimalnya monev semesteran Bakesbangpol
3.	Kecenderungan kurangnya pemahaman Ideologi Pancasila dan demokrasi	Kecenderungan kurangnya partisipasi politik masyarakat
		Kecenderungan menurunnya Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi
		Kurangnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat
		Kurang Optimalnya kebijakan tentang Pendidikan politik, etika dan budaya politik
		Kurang Optimalnya monitoring dan evaluasi

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Kurang Optimalnya fasilitasi kelembagaan politik
		Kurang Optimalnya Hibah Partai politik dan lembaga pemilu
		Kecenderungan menurunnya kapasitas kelembagaan partai politik
		Kecenderungan menurunnya internalisasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
		Pengintegrasian Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari
		Meningkatnya pendidikan karakter
		Kurangnya Materi / Bahan yang Relevan dan Kontekstual
		Kurangnya Diversifikasi media dan Metode Edukasi
		Kurang Optimalnya Kapasitas SDM Pelaksana
4.	Kurang Optimalnya Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini	Kurangnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
		Kurang Optimalnya Kebijakan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
		Kurang Optimalnya Koordinasi dan Pelaksanaan Pengawasan Ormas
		Kurang Optimalnya Pelaksanaan Pendataan Ormas
		Kurang Optimalnya Koordinasi Penyusunan Pemetaan Potensi Konflik
		Kurangnya Kapasitas SDM dan Agen Deteksi
		Kurang Optimalnya fasilitasi penanganan konflik ssosial
		Meningkatnya Sistem Pemantauan Konflik Berbasis Data
		Kurang Optimalnya Peran forum dan masyarakat dalam deteksi dini
		Kurang Optimalnya pemahaman keragaman dan pluralisme
		Kurang Optimalnya kegiatan harmonisasi umat beragama
		Kurang Optimalnya peran forum dalam menjaga kerukunan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan politik dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1. Kurangnya sarana prasarana penunjang yang memadai
- 2. Belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Kurang optimalnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Belum terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional kantor
5. Kurang optimalnya pemeliharaan kendaraan operasional kantor
6. Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas
7. Belum terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai
8. Kurang optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi
9. Kurang optimalnya sosialisasi peraturan perundangan bagi pegawai
10. Belum terpenuhinya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai
11. Kurangnya keterbukaan informasi publik
12. Kurang ter updatenya Website dan papan pengumuman Bakesbangpol
13. Kurangnya pejabat pengelola informasi publik Bakesbangpol
14. Kurangnya kanal aduan dan tindak lanjut pengaduan di Bakesbangpol
15. Kurang optimalnya pengelolaan arsip Bakesbangpol dengan baik
16. Kurang optimalnya perencanaan kinerja yang baik
17. Kurang Optimalnya dokumen renstra Bakesbangpol
18. Kurang Optimalnya dokumen renja Bakesbangpol
19. Kurang Optimalnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bakesbangpol
20. Kurang Optimalnya penganggaran perangkat daerah yang baik
21. Kurang Optimalnya dokumen RKA Bakesbangpol
22. Kurang Optimalnya dokumen DPA Bakesbangpol
23. Kurang Optimalnya Register Risiko Bakesbangpol
24. Kurang Optimalnya pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah
25. Kurang Optimalnya monev bulanan Bakesbangpol
26. Kurang Optimalnya monev tri bulanan Bakesbangpol
27. Kurang Optimalnya monev semesteran Bakesbangpol
28. Kecenderungan kurangnya partisipasi politik masyarakat
29. Kecenderungan menurunnya Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi
30. Kurangnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat
31. Kurang Optimalnya kebijakan tentang Pendidikan politik, etika dan budaya politik
32. Kurang Optimalnya monitoring dan evaluasi
33. Kurang Optimalnya fasilitasi kelembagaan politik

34. Kurang Optimalnya Hibah Partai politik dan lembaga pemilu
35. Kecenderungan menurunnya kapasitas kelembagaan partai politik
36. Kecenderungan menurunnya internalisasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
37. Pengintegrasian Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari
38. Meningkatnya pendidikan karakter
39. Kurangnya Materi / Bahan yang Relevan dan Kontekstual
40. Kurangnya Diversifikasi media dan Metode Edukasi
41. Kurang Optimalnya Kapasitas SDM Pelaksana
42. Kurangnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
43. Kurang Optimalnya Kebijakan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
44. Kurang Optimalnya Koordinasi dan
45. Pelaksanaan Pengawasan Ormas
46. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Pendataan Ormas
47. Kurang Optimalnya Koordinasi Penyusunan Pemetaan Potensi Konflik
48. Kurangnya Kapasitas SDM dan Agen Deteksi
49. Kurang Optimalnya fasilitasi penanganan konflik sosial
50. Meningkatnya Sistem Pemantauan
51. Konflik Berbasis Data
52. Kurang Optimalnya Peran forum dan masyarakat dalam deteksi dini
53. Kurang Optimalnya pemahaman keragaman dan pluralisme
54. Kurang Optimalnya kegiatan harmonisasi umat beragama
55. Kurang Optimalnya peran forum dalam menjaga kerukunan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memuat arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode lima tahun ke depan, sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan wakil presiden terpilih.

RPJMN 2025–2029 juga mengintegrasikan berbagai tantangan global, nasional, dan regional yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol),

perlu secara proaktif menyesuaikan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional.

Isu Global dan Nasional yang Relevan

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan Global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan termasuk perang Israel dengan Negara Timur Tengah yang akan berpengaruh terhadap geoekonomi.

2. Isu Demokrasi dan Politik Identitas

Meningkatnya polarisasi politik, persebaran disinformasi, serta penguatan politik identitas di tingkat global dan nasional menjadi tantangan yang membutuhkan penguatan moderasi berpolitik di tingkat daerah.

3. Perubahan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi memengaruhi pola komunikasi politik dan potensi penyebaran radikalisme online.

4. Ancaman Intoleransi & Radikalisme

Kecenderungan peningkatan intoleransi sosial dan munculnya paham radikal di kalangan muda menjadi isu prioritas yang harus ditangani

Beberapa program strategis dalam RPJMN 2025–2029 yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol antara lain:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Menguatnya Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan aktualiasi nilai-nilai Pancasila.

2. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu melalui Penguatan Tata kelola Partai Politik dan pendidikan Politik

3. Penguatan Lembaga Demokrasi

Terwujudnya lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, tidak sekedar demokrasi yang formal dengan terlaksananya pemilu saja.

4. Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional

Meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan dan perangkat daerah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

5. Peningkatan Peran Masyarakat Sipil dan Lembaga Nonpemerintah

Memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga ketahanan sosial.

b. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri memiliki potensi sejalan dengan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan kelembagaan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, yaitu urusan dalam negeri guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keberadaan Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Perpres ini mengatur mengenai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kementerian mempunyai tugas urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut 1.) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2.) Pengkoordinasian, Pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3.) perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Adaptif, Inovatif dan Profesional (APIK) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- 1) **Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.**
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik
- 3) Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi
- 4) Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2025-2029, sebagai berikut:

T1 : Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia;

Berdasarkan Visi dan Misi Kementrian Dalam Negeri tersebut tampak jelas kedudukan dan fungsi dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, dimana keberadaannya mengemban misi pertama yaitu **“Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia”**.

Berdasarkan Rencana strategis Kementerian yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak dengan tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas” dan “Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman” maka

program dari Renstra Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Demak adalah Program Peningkatan Kebebasan Sipil, Hak-hak politik dan Lembaga Demokrasi, Peningkatan Simpul Pembumih Pancasila, Peningkatan Aparatur dalam melaksanakan upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas dan Fasilitas Kewaspadaan Daerah.

2. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana awal Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi Gubernur Jawa Tengah, yaitu **Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berwibawa, dan Berkelanjutan dengan Semangat Kolaboratif dan Responsif Menuju Indonesia Emas 2045**. untuk mencapai visi Gubernur tersebut terdapat misi sesuai dengan tugas dan fungsinya Bakesbangpol yaitu **Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan**.

Isu-isu strategis bidang kesatuan bangsa dan Politik yaitu

1. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama
 - Penguatan regulasi, pendidikan, pelatihan moderasi beragama.
 - Promosi moderasi beragama ke luar negeri.
 - Pemberantasan narkoba.
 - Penguatan kolaborasi Forkopimda.
2. Penguatan Ketahanan Wilayah & Stabilitas Politik
 - Optimalisasi koordinasi penanganan konflik sosial.
 - Pencegahan potensi konflik politik, SARA, dan sosial.
 - Penguatan pengamalan pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika).
 - Penguatan kohesi sosial dan integrasi masyarakat.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dibandingkan

dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031. Tujuan penataan ruang Kabupaten Demak adalah mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah dan pariwisata.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Demak yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Meskipun tidak tertulis secara spesifik dalam RTRW Kabupaten Demak yang menyangkut program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan dokumen RTRW Kabupaten Demak secara keseluruhan merupakan data penting bagi Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Demak.

Keberadaan dokumen RTRW menjadi salah satu data penting guna mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Demak, yaitu:

- a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai lahan pengembangan kawasan strategis.
- b. Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan pertambangan atau perindustrian.

Tabel 2.9.
Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
		N i h i l			

d. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Pada dasarnya untuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tidak terkait langsung dengan KLHS. Namun dapat dikaitkan atau dapat menunjang secara tidak langsung pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No T16 yaitu “Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan

untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”

Tabel 2.10.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
	N i h i l

Tabel 2.11.
Rekomendasi Pencapaian TPB
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak

No	Indikator	TARGET					Target Perpres 59/2017	Skenario Upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
		N	i	h	i	l		

e. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

1. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan Kepala Daerah

terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak **Bermartabat, Maju dan Sejahtera**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan **reformasi birokrasi**.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa **sumber daya manusia** telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik pada terutama pada sektor **ekonomi**.

Dari tiga frase diatas dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2029 adalah reformasi birokrasi yang bermartabat, sumber daya manusia yang semakin maju, dan perekonomian masyarakat semakin sejahtera.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan dalam 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak
- b. Mengembangkan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal
- c. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas
- d. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- e. Memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan

3. Tujuan dan Sasaran Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD dan Musrenbang daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah ditetapkan sebagai berikut:

a) TUJUAN

- 1) **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter**
- 2) **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas**
- 3) **Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan**
- 4) **Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan**
- 5) **Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman**

Dari kelima tujuan tersebut Rencana strategis Bakesbangpol berfokus pada tujuan kelima yaitu Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman dengan Indikator Tujuan yaitu Indeks Harmoni Indonesia.

b) SASARAN

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- 2) Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital
- 4) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

- 5) Meningkatnya Kinerja Aparatur
- 6) Meningkatnya sektor unggulan daerah yang berkelanjutan
- 7) Meningkatnya Investasi Daerah
- 8) meningkatnya pendapatan masyarakat
- 9) Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata
- 10) Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas
- 11) Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang
- 12) Meningkatnya kondusivitas wilayah
- 13) Meningkatnya kemandirian desa

Dari sasaran tersebut diatas Renstra Bakesbangpol sesuai Tujuannya berfokus pada Meningkatnya kondusivitas wilayah.

4. Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih

Berikut adalah program unggulan Kabupaten Demak untuk periode RPJMD 2025–2029, sebagaimana dirumuskan dalam Musrenbang dan Rapat Paripurna oleh Bupati Eisti'anah dan Wabup Gus Bad (Muhammad Badruddin):

1. Demak Cerdas dan Berkarakter

Menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan karakter generasi muda melalui: peningkatan kapasitas guru, akses internet sekolah, beasiswa siswa berprestasi dan kurang mampu, serta pelatihan vokasional dan teknopreneurship

2. Demak Religius

Memperkuat identitas religius sebagai “Kota Wali” melalui tambahan kesejahteraan untuk guru Madin/TPQ/ponpes, bantuan tempat ibadah, beasiswa penghafal Al-Qur'an, dan festival santri kreatif

3. Demak Produktif dan Mandiri

Fokus pada pemberdayaan sektor ekonomi lokal: pertanian, perikanan, UMKM, PKL; pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; serta peningkatan investasi demi lapangan kerja dan kemandirian ekonomi

4. Demak Smart Governance

Modernisasi birokrasi melalui digitalisasi, meritokrasi ASN, pelayanan publik berbasis teknologi (“smart village”), dan peningkatan transparansi serta efisiensi

5. Demak Mantap

Pembangunan infrastruktur merata mencakup jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, pasar tradisional, serta penataan kota demi mendukung pertumbuhan ekonomi

6. Demak Tangguh dan Lestari.

Penguatan ketahanan sosial dan lingkungan melalui: pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan, pengelolaan sampah terpadu, mitigasi banjir/rob/kekeringan, rehabilitasi pesisir, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah umum di daerah tidak secara spesifik mengampu program unggulan Bupati, namun setiap program dan kegiatan di Bakesbangpol dapat berkolaborasi untuk mewujudkan program unggulan tersebut.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Isu Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHN PD	ISU YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Kecenderungan kurangnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan demokrasi	• Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan • Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Memperkokoh Ideologi Pancasila hukum dan HAM	- Meningkatnya kemitraan pengembangan negara demokrasi - Pembumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Stabilitas Sosial pada Kehidupan Masyarakat
	Kurang Optimalnya Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini	• Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan • Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan	- Pencegahan dan penanganan konflik sosial - Pembinaan kerukunan umat beragama	Peningkatan Kerukunan Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHN PD	ISU YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia	antar suku, intra suku, ras dan golongan	
	Kurangnya kualitas pelayanan publik Bakesbangpol	Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis	Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Bakesbangpol
	kurangnya kualitas akuntabilitas kinerja Bakesbangpol	Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis	Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan stabilitas sosial pada kehidupan masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya pemahaman Ideologi Pancasila dan Demokrasi
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Bakesbangpol

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkat-nya kondusivitas wilayah	Meningkat-kan stabilitas sosial pada kehidupan masyarakat		Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadia n	0 = Tidak Ada	0 = Tidak Ada	0 = Tidak Ada	0 = Tidak Ada	0 = Tidak Ada	0 = Tidak Ada	0 = Tidak Ada	Banyaknya Benturan Fisik Dengan Kekerasan Antara Dua Kelompok Masyarakat Atau Lebih Yang Berlangsung Dalam Waktu Tertentu Yang Didasarkan Pada Sentimen Identitas Yang Menyangkut Keturunan, Agama, Kesukuan Dan Golongan
		Meningkatnya pemahaman Ideologi Pancasila dan demokrasi	Persentase Konflik sosial yang dapat di cegah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	proporsi kejadian konflik sosial yang berhasil dihindari atau dicegah melalui intervensi tertentu, seperti mediasi, sosialisasi, penyuluhan, kebijakan preventif, atau keterlibatan lembaga keamanan dan masyarakat
		Menigkatnya tata kelola pemerintahan di Bakesbangpol	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,2	4,23	4,27	4,31	4,35	4,40	4,45	digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Badan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi
			Nilai SAKIP Bakesbangpol	Angka	78,66	78,86	79,07	79,19	79,35	79,47	79,59	nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun evaluasi

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2.

Tahapan Strategi

Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
➤ Mengembangkan Penguatan Ideologi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan	➤ Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan	➤ Memantapkan Penguatan Ideologi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan	➤ Mempercepat Penguatan Ideologi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan	➤ Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan
➤ Mengembangkan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	➤ Meningkatkan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	➤ Memantapkan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta budaya Politik	➤ Mempercepat Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta budaya Politik	➤ Mewujudkan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
➤ Mengembangkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Agama	➤ Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Agama	➤ Memantapkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Agama	➤ Mempercepat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Agama	➤ Mewujudkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Agama
➤ Mengembangkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	➤ Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	➤ Memantapkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	➤ Mempercepat Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	➤ Mewujudkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
➤ Mengembangkan Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	➤ Meningkatkan Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	➤ Memantapkan Peningkatan Kewaspadaan Dini dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	➤ Mempercepat Peningkatan Kewaspadaan Dini dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	➤ Mewujudkan Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
➤ Mengembangkan Peningkatan	➤ Meningkatkan Peningkatan kualitas	➤ Memantapkan Peningkatan kualitas	➤ Mempercepat Peningkatan kualitas	➤ Mewujudkan Peningkatan kualitas

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
kualitas perencanaan, Penganggaran dan monitoring dan evaluasi	perencanaan, Penganggaran dan monitoring dan evaluasi	perencanaan, Penganggaran dan monitoring dan evaluasi	perencanaan, Penganggaran dan monitoring dan evaluasi	perencanaan, Penganggaran dan monitoring dan evaluasi
➤ Mengembangkan Tersedia Sarana penunjang yang memadai	➤ Meningkatkan Tersedia Sarana penunjang yang memadai	➤ Memantapkan Tersedia Sarana penunjang yang memadai	➤ Mempercepat Tersedia Sarana penunjang yang memadai	➤ Mewujudkan Tersedia Sarana penunjang yang memadai
➤ Mengembangkan Peningkatan kualitas sumber daya ASN Bakesbangpol	➤ Meningkatkan Peningkatan kualitas sumber daya ASN Bakesbangpol	➤ Memantapkan Peningkatan kualitas sumber daya ASN Bakesbangpol	➤ Mempercepat Peningkatan kualitas sumber daya ASN Bakesbangpol	➤ Mewujudkan Peningkatan kualitas sumber daya ASN Bakesbangpol
➤ Mengembangkan Keterbukaan informasi publik	➤ Meningkatkan Keterbukaan informasi publik	➤ Memantapkan Keterbukaan informasi publik	➤ Mempercepat Keterbukaan informasi publik	➤ Mewujudkan Keterbukaan informasi publik

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	ketera ngan
	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman			
	Perwujudan kondusifitas wilayah	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Pemantapan penguatan ideologi Pancasila dan wasbang, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Pemantapan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Pemantapan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara/ Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara spesifik **tidak** mengampu program prioritas, namun mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas yaitu Demak Religius, Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Demak Religius

Terdiri dari Kegiatan Prioritas Pemberian bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Fasilitasi forum Ulama Umaro.

Dalam RPJMD 2025-2029 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN 2025-2029 dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Demak turut mendukung Asta Cita 2025-2029 sebagai bentuk keselarasan pembangunan Kabupaten Demak dengan pembangunan nasional. Bentuk

dukungan Kabupaten Demak terhadap Asta Cita dengan PD Pelaksana Bakesbangpol tersaji sebagai berikut:

Program Prioritas Nasional Bakesbangpol dalam RPJMD 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Dukungan Program
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
2	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Secara terinci, dukungan Program Bakesbangpol terhadap terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1.
Dukungan Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
1																
NIHIL																

4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum. Program, kegiatan dan sub kegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Demak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				14.964.743.151		15.504.278.550		39.244.209.304		54.784.539.364		15.025.272.726		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.964.743.151		15.504.278.550		39.244.209.304		54.784.539.364		15.025.272.726		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.336.371.351		4.488.295.550		4.534.610.304		4.545.788.364		4.552.833.726	
	Meningkatnya kepuasan layanan bakesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bakesbangpol (Dengan Satuan:Persen)	92,29	93,30	93,33		93,36		93,39		93,41		93,44		SEKRETARIS BADAN
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan tepat waktu	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kasubbag Program dan Keuangan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	3		2		2		2		2		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.767.571.151		3.806.495.325		3.842.810.304		3.879.488.364		3.916.533.726	
	Terlaksanya layanan administrasi keuangan	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan Bakesbangpol (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.595.539.926		3.631.495.325		3.667.810.304		3.704.488.364		3.741.533.726	Kasubbag Program dan Keuangan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	11	30	35		33		35		35		35		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					172.031.225		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Program dan Keuangan
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000		122.500.000		122.500.000		100.000.000		100.000.000	
	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian (Bakesbangpol)	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	16	22	33		38		40		40		40		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					77.500.000		100.000.000		100.000.000		77.500.000		77.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	16	22	35		38		40		40		40		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					208.800.000		212.300.000		212.300.000		209.300.000		209.300.000	
	Terlaksananya layanan administrasi umum	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	1	2		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	1	3		3		3		3		3		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					17.000.000		20.000.000		20.000.000		17.000.000		17.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	4		3		3		3		3		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					126.500.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	73	65	65		65		65		65		65		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06 .0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0		0		0		0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		0		0		0		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.200		60.000.225		70.000.000		70.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Person)	90	90	92		95		97		98		99		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		225		0		0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		0		0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		0		0		0		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		2		2		2		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.200		40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	1	5		4		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		0		20.000.000		20.000.000		5.000.000	-
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0		0		2		1		1		-
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	
	Tersedianya jasa penunjang urusan	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	
	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	95	95	96		97		98		99		99		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					75.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	11	13	11		11		13		13		13		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		0		0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	0	2		4		4		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		15		15		15		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.130.000.000		2.010.000.000		1.963.616.000		2.275.000.000		1.875.000.000	
	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	73	74	75		76,5		77,5		78		80		BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN KETAHAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.130.000.000		2.010.000.000		1.963.616.000		2.275.000.000		1.875.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan pengintegrasian Nilai Pancasila, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.2.01 .0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					0		0		0		0		0	Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	1		1		1		1		1		Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8.01.02.2.01 .0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1.445.000.000		1.245.000.000		1.108.616.000		1.345.000.000		945.000.000	Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	1200	1500	1250		1670		1420		1780		1050		Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8.01.02.2.01 .0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					90.000.000		125.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	200	3735	800		1350		1600		1600		1600		Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.2.01 .0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					50.000.000		75.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8.01.02.2.01 .0008	Pembentukan Paskibraka					525.000.000		525.000.000		525.000.000		600.000.000		600.000.000	Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Dengan Satuan:Orang)	30	30	30		30		30		30		30		Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8.01.02.2.01 .0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dengan Satuan:Orang)	30	30	30		30		30		30		30		Kelompok Substansi Ideologi dan WASBANG
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.506.472.000		3.925.233.000		27.625.233.000		42.853.001.000		3.676.472.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rasio masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik (Dengan Satuan:Persen)	73	74	74,42		74,56		74,72		74,84		74,98		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARA KATAN
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					3.506.472.000		3.925.233.000		27.625.233.000		42.853.001.000		3.676.472.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Internalisasi nilai demokrasi pancasila, etika dan dan budaya politik (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi politik dalam negeri
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Substansi politik dalam negeri

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan: Dokumen)	1	0	1		1		1		1		1		Kelompok Substansi politik dalam negeri
8.01.03.2.01 .0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					775.000.000		1.123.761.000		1.023.761.000		1.051.529.000		875.000.000	Kelompok Substansi politik dalam negeri
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	320	1895	975		1450		1180		1200		1050		Kelompok Substansi politik dalam negeri
8.01.03.2.01 .0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					45.000.000		95.000.000		495.000.000		495.000.000		95.000.000	Kelompok Substansi politik dalam negeri

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	25	100		150		325		325		150		Kelompok Substansi politik dalam negeri
8.01.03.2.01 .0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					2.686.472.000		2.696.472.000		26.096.472.000		41.296.472.000		2.696.472.000	Kelompok Substansi politik dalam negeri
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi politik dalam negeri
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					2.778.750.000		2.588.750.000		2.588.750.000		2.588.750.000		2.593.967.000	
	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persestntase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif (Dengan Satuan:Persen)	71	71,3	71,5		72		72,5		73		73,5		BIDANG POLDAGRI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					2.778.750.000		2.588.750.000		2.588.750.000		2.588.750.000		2.593.967.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang Mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	1		1		1		1		1		Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					295.000.000		395.000.000		395.000.000		295.000.000		295.000.000	Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	570	445		645		645		450		400		Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					33.750.000		63.750.000		73.750.000		73.750.000		33.750.000	Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	12	335	70		140		140		140		80		Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					2.440.000.000		2.120.000.000		2.110.000.000		2.210.000.000		2.255.217.000	Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi organisasi kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					515.000.000		745.000.000		765.000.000		765.000.000		550.000.000	
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan agama (Dengan Satuan:Persen)	70	71	72		73		74		75		76		BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN KETAHAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					515.000.000		745.000.000		765.000.000		765.000.000		550.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan pemahaman keragaman dan plurarisme (Dengan Satuan:Dokumen)	12	2	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
8.01.05.2.01 .0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					0		0		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	1		1		1		1		5		Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
8.01.05.2.01 .0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					275.000.000		475.000.000		475.000.000		475.000.000		275.000.000	Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	120	170	375		700		700		700		375		Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.05.2.01 .0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					40.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	12	200	70		125		150		150		150		Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
8.01.05.2.01 .0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					200.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		200.000.000	Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.698.149.800		1.747.000.000		1.767.000.000		1.757.000.000		1.777.000.000	
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang teridentifikasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
															DAN PENANGANA N KONFLIK
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					1.698.149.800		1.747.000.000		1.767.000.000		1.757.000.000		1.777.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Peta Potensi konflik (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
8.01.06.2.01 .0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					0		20.000.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Substansi Penanganan Konflik
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1		Kelompok Substansi Penanganan Kon flik
8.01.06.2.01 .0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					61.149.800		80.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000	Kelompok Substansi Penanganan Konflik

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	80	200	100		150		150		200		200		Kelompok Substansi Penanganan Kon flik
8.01.06.2.01 .0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Kelompok Substansi Penanganan Konflik
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	12	60	304		304		304		304		304		Kelompok Substansi Penanganan Kon flik
8.01.06.2.01 .0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Kelompok Substansi Penanganan Konflik

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi Penanganan Kon flik
8.01.06.2.01 .0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					1.147.000.000		1.147.000.000		1.147.000.000		1.147.000.000		1.147.000.000	Kelompok Substansi Penanganan Konflik
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kelompok Substansi Penanganan Kon flik
TOTAL:					14.964.743.151		15.504.278.550		39.244.209.304		54.784.539.364		15.025.272.726		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0 = tidak ada kejadian
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,2	4,23	4,27	4,31	4,35	4,40	4,45	
3	Nilai SAKIP Bakesbangpol	Angka	78,66	78,86	79,07	79,19	79,35	79,47	79,59	

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

NIHIL

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan Pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.